

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi berjudul “Dampak Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) terhadap Etnis Tionghoa (1978-2006)”. Kesimpulan ini merujuk pada rumusan masalah serta hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. *Pertama*, kebijakan mengenai status kewarganegaraan Etnis Tionghoa yang berlaku saat ini tidak terlepas dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Ketika pemerintah Tiongkok pada tahun 1909 mengklaim seluruh Etnis Tionghoa adalah warga negara Tiongkok, pemerintah Hindia Belanda mengakui bahwa yang lahir di wilayah Hindia Belanda adalah termasuk kaulanegara Belanda. Hal ini menyebabkan terjadinya dwikewarganegaraan pada Etnis Tionghoa. Hal tersebut pun berlanjut hingga pada masa kemerdekaan Indonesia dimana upaya untuk terus menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan ini terus dilakukan. Pada tahun 1955 akhirnya dicapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah dwikewarganegaraan ini dengan terbentuknya UU No. 2 Tahun 1958. Namun, karena perkembangan politik di antara keduanya yang semakin memburuk, maka perjanjian mengenai dwikewarganegaraan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia pun dibatalkan dan Etnis Tionghoa yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus melalui proses naturalisasi yang panjang dan mahal.

Kedua, adalah dengan munculnya kebijakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui Surat Edaran Menteri Kehakiman No JB.3/4/12/1978 yang pada pelaksanaannya hanya ditujukan pada warga negara Indonesia keturunan Etnis Tionghoa dan sebagian kecil keturunan Etnis India, membuat Etnis Tionghoa harus memiliki surat bukti tersebut karena dibutuhkan untuk membuat berbagai dokumen kependudukan dan persyaratan administrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai permasalahan penerapan kebijakan SBKRI pun terjadi. Mulai dari kesenjangan peraturan dan penerapan dari segi biaya, lamanya pembuatan, pembuktian kewarganegaraan anak

Desi Darmayanti, 2018

DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

yang orang tuanya memegang SBKRI hingga masih dimintanya SBKRI selepas dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa SBKRI tidak diberlakukan lagi. Hal ini menimbulkan berbagai masalah karena hingga dikeluarkan peraturan lain pun seperti Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 atau Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1999 yang secara jelas melarang dimintanya SBKRI, namun dalam kenyataannya, Etnis Tionghoa masih dimintai SBKRI. Adapun alasan yang digunakan pejabat birokrat adalah untuk (1) sebagai alat untuk membedakan mana Etnis Tionghoa asing dan Etnis Tionghoa yang merupakan warga negara Indonesia (2) KTP atau KK yang relatif mudah untuk dipalsukan dan, (3) adanya UU No. 62 Tahun 1958 yang menjadi dalih dari dimintanya SBKRI. Untuk menyelesaikan masalah SBKRI ini pada akhirnya dikeluarkan UU No. 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan Indonesia. Penerapan kebijakan SBKRI yang penuh masalah ini juga menimbulkan pertanyaan dari Etnis Tionghoa maupun masyarakat pada umumnya karena dipenuhi dengan unsur diskriminasi pada Etnis Tionghoa.

Ketiga, dampak SBKRI bagi Etnis Tionghoa dapat dilihat dari bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh pemain bulutangkis dalam pembuatan paspor untuk bertanding di luar negeri. Penerapan SBKRI juga dirasa membuat mereka masih dipertanyakan nasionalismenya pada Republik Indonesia. Selain itu, dampak dari penerapan SBKRI juga adalah munculnya kesulitan untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan di berbagai bidang kehidupan juga untuk membuat berbagai dokumen kependudukan. Pentingnya SBKRI ini bagi Etnis Tionghoa pula yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai lahan korupsi dengan mematok harga pengurusan SBKRI hingga begitu mahal.

5.1 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi berkaitan dengan penerapan kebijakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Walaupun saat ini sudah tidak ada peraturan mengenai SBKRI ini, namun beberapa tahun silam masih tetap terdengar laporan ada pihak yang masih

Desi Darmayanti, 2018

DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

meminta SBKRI. Rekomendasi yang sekiranya dapat penulis berikan adalah:

1. Memberikan peraturan dan sanksi yang tegas bagi para birokrat dari instansi yang kerap meminta SBKRI.
2. Memberikan sosialisasi mengenai peraturan yang berkaitan dengan bukti kewarganegaraan Etnis Tionghoa secara menyeluruh kepada berbagai tingkatan birokrasi supaya tidak ada kesalahan komunikasi dan interpretasi yang merugikan berbagai pihak.
3. Menghilangkan peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif.
4. Menekan biaya administrasi yang diperlukan sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat yang kurang mampu.

Desi Darmayanti, 2018

DAMPAK SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (SBKRI) TERHADAP ETNIS TIONGHOA (1978-2006)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu